

BER-PANCASILA DALAM MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PEMBELAJARAN PANCASILA

Pancasila bukan sekadar susunan kata-kata indah yang terukir dalam lembaran sejarah atau tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar. Lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa bangsa, fondasi negara, dan sekaligus kompas moral yang membimbing perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah dengan cepat, serta di tengah arus globalisasi yang membawa berbagai ideologi dan tantangan baru, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial.

Pembelajaran materi "Ber-Pancasila dalam Masyarakat" memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Atas, khususnya kelas 12. Pada usia ini, peserta didik sedang dalam tahap pembentukan identitas dan persiapan untuk terjun ke tengah masyarakat yang lebih luas. Mereka akan menghadapi kompleksitas persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memerlukan landasan nilai yang kokoh. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai panduan hidup, potensi terjadinya disorientasi nilai, munculnya sikap intoleran, hingga tergerusnya rasa persatuan dan kesatuan akan semakin besar.

Materi ini dirancang untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan kognitif tentang Pancasila, melainkan juga untuk menumbuhkan kesadaran afektif dan mendorong perilaku psikomotorik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), peserta didik diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan solusi atas berbagai permasalahan sosial berdasarkan perspektif Pancasila. Mereka akan diajak untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga menghayati dan mengimplementasikan Pancasila sebagai way of life yang relevan dalam konteks kontekstual dan dinamis.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini secara mendalam, peserta didik diharapkan mampu:

- A. Menganalisis secara kritis kedudukan, fungsi, dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat.
- B. Menjelaskan interpretasi kontemporer terhadap nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) serta relevansinya dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

- C. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan.
- D. Menganalisis tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengamalan Pancasila di era modern, termasuk dampak globalisasi, disrupsi digital, dan polarisasi sosial.
- E. Merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat pengamalan Pancasila secara berkelanjutan.
- F. Membangun komitmen pribadi dan kolektif untuk senantiasa ber-Pancasila dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab.
- G. Mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial sehari-hari.

III. LANDASAN FILOSOFIS BER-PANCASILA

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA (PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG)

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan filosofis yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan seluruh aspek kehidupan bernegara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi negara, sekaligus menjadi sumber segala sumber hukum.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa makna penting:

- a. Sebagai sumber dari segala sumber hukum: Pancasila menjadi acuan tertinggi bagi pembentukan konstitusi dan semua peraturan hukum di Indonesia.
- b. Sebagai ideologi negara: Pancasila memberikan identitas, karakter, dan tujuan bagi negara Indonesia. Ia merupakan konsensus dasar yang mengikat seluruh elemen bangsa.
- c. Sebagai perjanjian luhur bangsa: Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar berdirinya negara Indonesia yang merdeka.
- d. Sebagai cita-cita hukum: Pancasila memuat cita-cita dan norma-norma moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan hukum negara.

2. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA (WAY OF LIFE)

Di samping sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Ini berarti Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki makna:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi individu dalam bersikap dan bertindak: Setiap warga negara diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai patokan moral dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
- b. Mengintegrasikan masyarakat yang majemuk: Di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan, Pancasila hadir sebagai perekat yang menyatukan perbedaan dan mempromosikan persatuan.
- c. Membentuk karakter dan identitas bangsa: Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan.
- d. Memberikan arah bagi pembangunan nasional: Setiap program pembangunan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin.

3. NILAI-NILAI DASAR PANCASILA

Setiap sila dalam Pancasila bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kelima sila tersebut membentuk sistem nilai yang harmonis.

a. KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sila pertama ini mengamanatkan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Ini berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan ateis. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya, dan setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nilai ini mendorong sikap toleransi antarumat beragama, kerukunan, serta menghindarkan diri dari sikap memaksakan kehendak atau penistaan agama lain.

b. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Sila kedua ini mengandung makna bahwa setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan status sosial. Nilai ini mendorong sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan.

c. PERSATUAN INDONESIA

Sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah perwujudan dari sila ini. Kebhinekaan Tunggal Ika menjadi semangat utama.

d. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Sila keempat ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta lembaga-lembaga perwakilan lainnya. Sistem demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, bukan voting semata. Nilai ini mendorong sikap mengutamakan kepentingan umum, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menghormati setiap keputusan yang dicapai melalui musyawarah.

e. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Sila kelima ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Ini mencakup keadilan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Nilai ini mendorong sikap mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

B. INTERPRETASI KONTEMPORER NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Dalam konteks kekinian, nilai-nilai Pancasila harus terus diinterpretasikan dan diterapkan secara relevan agar tidak kehilangan maknanya.

1. Ketuhanan yang Maha Esa: Di era digital, nilai ini berarti menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama, serta mempromosikan dialog antariman untuk memperkuat kerukunan. Ini juga berarti bertanggung jawab atas lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini menuntut kita untuk melawan segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, perundungan siber (cyberbullying), serta memperjuangkan hak asasi manusia bagi semua, termasuk kelompok rentan dan minoritas. Keadilan berarti akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum.
3. Persatuan Indonesia: Dalam masyarakat yang rentan terhadap polarisasi dan hoaks, nilai persatuan mendorong kita untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman ideologi transnasional, serta merayakan keberagaman sebagai kekuatan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Partisipasi aktif dalam demokrasi digital melalui platform online, menyalurkan aspirasi secara konstruktif, serta mengkritisi kebijakan publik dengan bijak merupakan bagian dari nilai ini. Musyawarah harus tetap menjadi jiwa dalam setiap diskusi publik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Ini berarti mendukung kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, mendorong inklusi digital bagi semua lapisan masyarakat, memerangi korupsi, serta memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera.

IV. IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. BIDANG POLITIK DAN DEMOKRASI

Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia, mewujudkan demokrasi yang khas, yaitu demokrasi Pancasila.

1. MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK

Prinsip musyawarah untuk mufakat adalah inti dari demokrasi Pancasila, yang membedakannya dari sistem demokrasi liberal yang seringkali mengandalkan suara mayoritas semata. Dalam konteks masyarakat, musyawarah berarti adanya dialog terbuka, saling menghargai pendapat, mencari titik temu, dan mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak.

- a. Dalam Lingkungan Keluarga: Musyawarah dapat dilakukan dalam menentukan keputusan bersama, seperti rencana liburan, pembagian tugas rumah tangga, atau penyelesaian masalah keluarga.
- b. Dalam Lingkungan Sekolah: Terwujud dalam pemilihan ketua kelas/OSIS, pembentukan panitia acara, diskusi kelompok, atau pengambilan keputusan dalam rapat siswa.
- c. Dalam Lingkungan Masyarakat: Diwujudkan melalui rapat RT/RW, rembug desa, forum warga, atau partisipasi aktif dalam lembaga perwakilan rakyat dengan menyampaikan aspirasi.
- d. Partisipasi Publik: Selain musyawarah, partisipasi publik juga mencakup penggunaan hak pilih dalam pemilu, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

2. ETIKA POLITIK BERLANDASKAN PANCASILA

Etika politik Pancasila menuntut para penyelenggara negara dan warga negara untuk menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran politiknya.

- a. Kejujuran dan Transparansi: Penyelenggara negara harus jujur dan transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan kebijakan, menghindari praktik korupsi dan nepotisme.
- b. Anti-diskriminasi dan Inklusivitas: Kebijakan politik harus berpihak pada keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.
- c. Mengutamakan Kepentingan Bersama: Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau partai politik.
- d. Toleransi dan Dialog: Menghindari politik pecah belah, agitasi yang provokatif, dan mengedepankan dialog konstruktif meskipun berbeda pandangan politik.

3. PENCEGAHAN RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Nilai-nilai Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia, merupakan benteng utama dalam mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme dan intoleransi.

- a. Pendidikan Toleransi: Membangun pemahaman bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman.

- b. Penguatan Moderasi Beragama: Mendorong pemahaman agama yang inklusif, damai, dan menghargai keberagaman.
- c. Konten Anti-radikalisme: Mendukung masyarakat tentang bahaya radikalisme dan intoleransi, serta pentingnya Pancasila sebagai solusi.
- d. Dialog Antar-golongan: Memfasilitasi dialog dan interaksi positif antar kelompok masyarakat yang berbeda.

B. BIDANG EKONOMI

Pancasila mengamanatkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, berorientasi kerakyatan, dan berkelanjutan.

1. EKONOMI KERAKYATAN DAN KEADILAN EKONOMI

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, mengutamakan koperasi, UMKM, dan pemerataan kesejahteraan.

- a. Dukungan terhadap Koperasi: Mengembangkan koperasi sebagai soko guru ekonomi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Pemberdayaan UMKM: Memberikan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
- c. Pemerataan Kesempatan: Memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- d. Perlindungan Konsumen: Menjamin hak-hak konsumen dan mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan rakyat.

2. ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pengusaha tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan etika dalam menjalankan bisnisnya.

- a. Praktik Bisnis yang Jujur: Menghindari penipuan, manipulasi harga, dan praktik bisnis tidak sehat lainnya.
- b. Kesejahteraan Karyawan: Memberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan hak-hak karyawan sesuai peraturan.
- c. Tanggung Jawab Lingkungan: Menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap alam.
- d. Kontribusi Sosial (CSR): Mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau pengembangan masyarakat.

3. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Pancasila menghendaki pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di perkotaan atau wilayah tertentu.

- a. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi hingga ke daerah terpencil.
- b. Akses Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan semua warga negara, termasuk di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan memadai.
- c. Pengembangan Potensi Daerah: Memberdayakan potensi ekonomi lokal di setiap daerah untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

C. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Pancasila menjadi landasan untuk menjaga kebhinekaan, memperkuat solidaritas, dan melestarikan warisan budaya bangsa.

1. KEBHINEKAAN TUNGGAL IKA DAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA/ETNIS

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah representasi nyata dari nilai persatuan dan kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

- a. Sikap Toleransi: Menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat.
- b. Dialog Antarbudaya: Mendorong interaksi positif dan pertukaran pengetahuan antar kelompok budaya untuk menumbuhkan saling pengertian.
- c. Pencegahan Diskriminasi: Melawan segala bentuk diskriminasi dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu.
- d. Merayakan Keberagaman: Mengadakan festival budaya, pertunjukan seni, atau kegiatan lain yang merayakan kekayaan budaya Indonesia.

2. GOTONG ROYONG DAN SOLIDARITAS SOSIAL

Gotong royong adalah praktik sosial yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, merupakan perwujudan dari nilai persatuan dan keadilan sosial.

- a. Kerja Bakti: Bersama-sama membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, atau membantu sesama yang membutuhkan.
- b. Solidaritas dalam Bencana: Mengumpulkan bantuan, menjadi relawan, atau memberikan dukungan moral bagi korban bencana alam.
- c. Musyawarah dan Kekeluargaan: Menyelesaikan masalah bersama dengan semangat kekeluargaan dan saling membantu.
- d. Pembentukan Komunitas Positif: Berpartisipasi dalam komunitas yang bertujuan untuk pengembangan diri atau membantu masyarakat.

3. PELESTARIAN NILAI BUDAYA LOKAL DAN NASIONAL

Pancasila mengamatkan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional yang bersumber dari kekayaan budaya lokal.

- a. Mengenal dan Mempelajari Budaya Lokal: Aktif mempelajari tarian daerah, musik tradisional, bahasa daerah, atau cerita rakyat.
- b. Melestarikan Situs Sejarah: Berpartisipasi dalam menjaga dan merawat peninggalan sejarah dan budaya.
- c. Menggunakan Produk Budaya Lokal: Bangga menggunakan produk-produk kerajinan, pakaian, atau makanan tradisional.
- d. Menangkal Westernisasi Negatif: Mampu menyaring budaya asing yang masuk, mengambil nilai positifnya, dan menolak yang bertentangan dengan Pancasila.

D. BIDANG HUKUM DAN HAM

Pancasila menegaskan pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

1. SUPREMASI HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Supremasi hukum berarti bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, sama di hadapan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Keadilan substantif berarti penegakan hukum tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencapai keadilan yang sejati.

- a. Kepatuhan Hukum: Mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan kriminal, dan menghormati proses hukum.
- b. Anti Korupsi: Menolak dan melaporkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak sendi-sendi keadilan.
- c. Akses Keadilan: Memastikan semua warga negara, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap bantuan hukum dan proses peradilan yang adil.
- d. Penegakan Hukum yang Tegas: Menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, profesional, dan tidak diskriminatif.

2. PENGHORMATAN DAN PENEGAKAN HAM BERLANDASKAN PANCASILA

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan HAM dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

- a. Menghargai Hak Orang Lain: Menjaga hak-hak individu lain seperti hak berpendapat, hak beribadah, dan hak untuk hidup.
- b. Perlindungan Kelompok Rentan: Memberikan perhatian khusus dan perlindungan kepada anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.
- c. Menolak Kekerasan: Melawan segala bentuk kekerasan, persekusi, dan penyaltaan.

- d. Pendidikan HAM: Mensosialisasikan pentingnya HAM dan bagaimana melindunginya dalam kehidupan sehari-hari.

3. PENCEGAHAN KORUPSI DAN PRAKTIK MENYIMPANG

Korupsi adalah musuh utama keadilan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap negara.

- a. Integritas Diri: Membangun karakter anti korupsi sejak dini melalui kejujuran dalam ujian dan tindakan sehari-hari.
- b. Pengawasan Masyarakat: Aktif mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan indikasi praktik korupsi.
- c. Edukasi Anti-korupsi: Menyebarkan pemahaman tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.
- d. Menjunjung Tinggi Profesionalisme: Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan menjauhi penyalahgunaan wewenang.

E. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pancasila sebagai dasar negara juga menjiwai sistem pertahanan dan keamanan negara, mengedepankan keamanan rakyat semesta.

1. WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang majemuk, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam.

- a. Menjaga Keutuhan Wilayah: Berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman luar maupun dalam.
- b. Penguatan Persatuan: Memelihara persatuan antar daerah dan suku bangsa sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- c. Cinta Tanah Air: Menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia, serta kesediaan untuk membela negara.
- d. Pembangunan Berbasis Kepulauan: Melakukan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. BELA NEGARA DAN PERAN MASYARAKAT

Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

- a. Kesadaran Bela Negara: Memahami arti penting bela negara bukan hanya secara militer, tetapi juga non-militer (ekonomi, sosial, budaya).
- b. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial: Aktif dalam kegiatan yang membangun ketahanan sosial masyarakat, seperti program keamanan lingkungan (siskamling) atau mitigasi bencana.
- c. Menjadi Warga Negara yang Produktif: Berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa melalui profesi masing-masing.
- d. Menjaga Keamanan Lingkungan: Melaporkan tindak kejahatan atau hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang.

3. PENCEGAHAN KONFLIK DAN JAGA KEDAMAIAN

Nilai persatuan dan kerakyatan dalam Pancasila mendorong upaya pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian.

- a. Mediasi Konflik: Menjadi mediator atau mencari solusi damai ketika terjadi perselisihan antar individu atau kelompok.
- b. Dialog Lintas Suku/Agama: Membangun jembatan komunikasi antar komunitas untuk mencegah prasangka dan kesalahpahaman.
- c. Menolak Kekerasan: Tidak menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar dari masalah.
- d. Promosi Budaya Damai: Menyebarkan nilai-nilai perdamaian, rekonsiliasi, dan toleransi dalam setiap interaksi sosial.

V. TANTANGAN DAN DINAMIKA BER-PANCASILA DALAM MASYARAKAT GLOBAL

A. ARUS GLOBALISASI DAN PENGARUH IDEOLOGI ASING

Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan informasi, namun juga membuka pintu bagi masuknya berbagai ideologi asing yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila.

1. Liberalisme dan Individualisme: Penekanan berlebihan pada kebebasan individu tanpa memperhatikan kepentingan kolektif dapat mengikis nilai gotong royong dan persatuan.
2. Ekstremisme dan Radikalisme Transnasional: Ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama atau etnis tertentu dapat mengancam kerukunan dan persatuan bangsa.
3. Kapitalisme: Orientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan keadilan sosial dapat memperlebar kesenjangan ekonomi.
4. Konsumerisme: Gaya hidup yang mendorong konsumsi berlebihan dapat mengikis nilai kesederhanaan dan kebersahaan.

B. DISRUPSI DIGITAL DAN HOAKS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa disrupsi yang signifikan, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar.

1. Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian: Berita palsu dan konten provokatif di media sosial dapat memecah belah bangsa, menumbuhkan prasangka, dan merusak kerukunan.
2. Polarisasi Sosial: Algoritma media sosial seringkali menciptakan filter bubble yang memperkuat pandangan kelompok sendiri dan memperlebar jurang perbedaan antarkelompok.
3. Kecanduan Gawai dan Penurunan Interaksi Sosial Langsung: Mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk membangun empati dan musyawarah.
4. Cyberbullying dan Kejahatan Siber: Mengancam martabat kemanusiaan dan merusak etika komunikasi.

C. POLARISASI SOSIAL DAN INTOLERANSI

Meskipun telah lama ber-Pancasila, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan polarisasi dan intoleransi yang kerap muncul.

1. Konflik Berbasis SARA: Meskipun jarang, konflik yang dipicu oleh sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan masih berpotensi terjadi.
2. Fragmentasi Sosial: Masyarakat cenderung mengelompok berdasarkan kesamaan identitas, yang dapat menghambat interaksi lintas kelompok.
3. Sikap Eksklusif: Kecenderungan untuk merasa kelompoknya paling benar dan menolak kehadiran atau pandangan kelompok lain.
4. Ketidakadilan Sosial: Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu ketegangan sosial.

D. PERAN PEMUDA DAN PENDIDIKAN PANCASILA

Generasi muda adalah agen perubahan, namun mereka juga rentan terhadap pengaruh negatif dari tantangan di atas.

1. Kurangnya Pemahaman Mendalam tentang Pancasila: Pancasila seringkali dianggap sebagai mata pelajaran hafalan semata, bukan nilai yang diinternalisasi.
2. Hilangnya Keteladanan: Kurangnya teladan dari pemimpin atau tokoh masyarakat dalam mengamalkan Pancasila.
3. Tantangan Relevansi: Anggapan bahwa Pancasila sudah usang dan tidak relevan dengan kehidupan modern.
4. Pengaruh Budaya Pop: Budaya populer yang cenderung individualistis dan materialistis dapat menggeser nilai-nilai luhur Pancasila.

VI. STRATEGI PENGUATAN PENGAMALAN PANCASILA

A. REVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila harus dirombak agar lebih kontekstual, menarik, dan menumbuhkan pemahaman mendalam.

1. Pembelajaran Berbasis Proyek: Menerapkan proyek-proyek yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah sosial dengan perspektif Pancasila.
2. Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.
3. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan media digital dan platform interaktif untuk menyampaikan materi Pancasila secara kreatif.
4. Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan kepada guru agar mampu mengajarkan Pancasila dengan pendekatan yang inspiratif dan aplikatif.
5. Kurikulum yang Adaptif: Mengembangkan kurikulum Pancasila yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer dan tantangan global.

B. PERAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

Penguatan Pancasila adalah tanggung jawab bersama dari tiga pilar pendidikan.

1. Keluarga: Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan sejak dini. Memberikan contoh sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sekolah: Menerapkan pendidikan Pancasila yang holistik, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta mengembangkan kegiatan yang memupuk rasa kebangsaan.
3. Masyarakat: Mengaktifkan kembali lembaga-lembaga sosial yang mendorong semangat gotong royong dan kekeluargaan. Membangun ruang-ruang dialog antar komunitas untuk mengatasi perbedaan dan mempromosikan perdamaian.

C. KETELADANAN PEMIMPIN DAN TOKOH MASYARAKAT

Keteladanan adalah metode paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai.

1. Integritas dan Moralitas: Para pemimpin dan tokoh masyarakat harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan moralitas yang tinggi dalam setiap tindakan.
2. Kepemimpinan Berbasis Pancasila: Menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan.
3. Konsistensi: Menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan dalam mengamalkan Pancasila.
4. Komunikasi Efektif: Menggunakan komunikasi yang persuasif dan inspiratif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

D. PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN KEWARGAAN

Di era digital, kemampuan memilah informasi dan berinteraksi secara bertanggung jawab sangat penting.

1. Edukasi Literasi Digital: Mengajarkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk kritis terhadap informasi, membedakan hoaks dari fakta, dan menggunakan media sosial secara positif.
2. Etika Berinteraksi di Dunia Maya: Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam etika berkomunikasi online, menghindari ujaran kebencian, cyberbullying, dan provokasi.
3. Kewargaan Digital: Mengajak warga negara untuk menjadi agen perubahan positif di dunia maya, menyebarkan konten yang edukatif dan mempersatukan.

E. PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

Setiap warga negara memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita Pancasila melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

1. Kontribusi Positif Sesuai Profesi: Berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing untuk kemajuan bangsa, misalnya dengan menjadi guru yang inspiratif, dokter yang melayani dengan tulus, atau petani yang inovatif.
2. Pengawasan Kebijakan Publik: Aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif untuk kebijakan yang lebih baik.
3. Mengatasi Masalah Sosial: Terlibat dalam program-program sosial untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, atau masalah lingkungan.
4. Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Menjadi agen perdamaian dan persatuan di lingkungan masing-masing, serta menolak segala bentuk perpecahan.

VII. KESIMPULAN DAN REFLEKSI AKHIR

Pancasila adalah anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Ia bukan hanya dasar negara yang kokoh, melainkan juga pandangan hidup yang relevan sepanjang masa. Ber-Pancasila dalam masyarakat berarti menjadikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagai landasan filosofis, etika moral, dan pedoman praktis dalam setiap aspek kehidupan.

Di tengah gempuran globalisasi, disrupsi digital, dan tantangan polarisasi, kesadaran akan urgensi Pancasila harus terus diperkuat. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara memiliki peran yang tak terpisahkan dalam memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi dihayati, diimplementasikan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pembelajaran mendalam tentang "Ber-Pancasila dalam Masyarakat" diharapkan mampu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan Pancasila. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang berlandaskan

Pancasila akan senantiasa terwujud dalam harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita terus bersama-sama bergotong royong, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan senantiasa ber-Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita.